

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikaruniai dengan beragam warisan budaya, kearifan lokal, etnis serta daerah wisata yang serta kemajemukan yang memiliki daya tarik tersendiri. Indonesia merupakan negara kepulauan seperti yang termaksud dalam Pasal 25 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Berdasarkan geografisnya Pulau Kalimantan memiliki letak yang strategis dalam pengembangan ekonomi dan pariwisata karena memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di beberapa titik khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan adanya PLBN maka sektor pariwisata dapat berkembang karena nilai tambah seperti produktivitas, konektivitas, ekspor, daya saing serta pendapatan daerah yang menonjol pada suatu daerah. Pendapatan daerah dalam sektor pariwisata jauh lebih terprediksi dan stabil karena diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kegiatan pariwisata dapat berjalan apabila terdapat daerah wisata dan wisatawan yang menjadi suatu kesatuan sistem. Sistem kepariwisataan tersebut dapat bekerja karena bertemunya sisi permintaan (*demand*) dan sisi penawaran (*supply*).

Didalam Visi dan Misi Dinas Pariwisata terdapat kalimat “terwujudnya Kabupaten Ketapang sebagai daerah tujuan pariwisata ...” dan “melaksanakan pengembangan sumber daya pariwisata daerah” namun pada kenyataannya dalam visi dan Misi tersebut belum ada yang tercapai kepada Obyek Wisata di Kabupaten Ketapang.

Apabila obyek wisata dapat dipandang sebagai bahan industri, maka bahan bakunya tidak akan pernah habis. Selaras dengan amanat konstitusi bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengharuskan setiap daerah untuk menggali potensi yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan daerah dan membiayai keperluan pembangunan di daerah tersebut. Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam pengoptimalan pendapatan daerah adalah dengan pengelolaan daerah wisata. Tujuan pengelolaan daerah wisata sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah pariwisata merupakan salah satu sektor yang akan memberi peluang besar dalam Pembangunan Nasional.

Obyek Wisata Pantai Tanjung Belandang adalah salah satu kawasan obyek wisata pantai yang terletak di Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, kabupaten ketapang kalimantan barat. Obyek wisata Tanjung Belandang merupakan salah satu tempat wisata yang tidak jauh dari pusat Kota Ketapang dan yang paling menjadi primadona di kabupaten Ketapang. Tepatnya sejauh 12 km dengan waktu tempuh 30 menit. Untuk menuju Pantai Tanjung Belandang bisa menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat.

Pantai Tanjung Belandang juga memiliki wilayah yang luas. Pada saat memasuki Obyek wisata pantai tanjung belandang ketika ada acara motor gestrek biasanya dipungut biaya sebesar Rp. 10.000,00.

Di Kawasan obyek wisata pantai tanjung belandang memiliki beberapa masalah seperti Permasalahan lingkungan yang kotor padahal didalam undang–undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan pasal 24 menyebutkan bahwa: “setiap orang berkewajiban: a) menjaga dan melestarikan daya tarik wisata, dan b) membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata”.

Tetapi pada kenyataan sebenarnya tidak seperti itu karena wisatawan mempunyai kebiasaan membuang sampah sembarangan karena pedagang setempat tidak menyiapkan tempat sampah di obyek wisata pantai tanjung belandang sehingga tempat sampah umum yang ada di obyek wisata Pantai Tanjung Belandang sulit untuk di temui lalu membuang sampahnya ke sekitaran pantai dan menyebabkan pantai terlihat kotor dan kumuh, selanjutnya adanya masyarakat sekitar pantai yang melepaskan hewan peliharaannya yaitu hewan sapi sehingga kotoran sapi tersebut berceceran kemana–mana dan mengakibatkan pantai kotor serta bau dan mengganggu kenyamanan para wisatawan yang sedang berkunjung ke Obyek Wisata Pantai Tanjung Belandang.

Masalah lainnya yang ada di Obyek Wisata Pantai Tanjung Belandang adalah adanya toilet umum yang dibangun di kawasan Pantai Tanjung

Belandang tetapi toilet tersebut sangat kering tidak ada air sama sekali karena kurangnya pengelolaan oleh pemerintah dan masyarakat sekitar, padahal didalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 3 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Pasal 1 nomor 16 menyebutkan fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian. Jadi seharusnya pemerintah lebih memperhatikan lagi fasilitas umum seperti toilet dan air bersih yang tidak ada di pantai tersebut. kemudian terdapat masalah kemacetan yang sering terjadi di pintu masuk obyek wisata Pantai Tanjung Belandang ketika hari libur, seperti libur akhir pekan atau hari libur sekolah, hal ini dikarenakan bahwa jalan pintu masuk tanjung belandang sangat kecil dan diperparah dengan kondisi jalan yang sedikit agak rusak inilah yang menyebabkan kemacetan itu terjadi di sepanjang jalan masuk kawasan Obyek Wisata Pantai Tanjung Belandang.

Padahal di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 3 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah pasal 7 huruf d menyebutkan pengembangan dan peningkatan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan internal dan konektivitas antar daya tarik wisata di dalam wilayah kabupaten atau kota. Jadi seharusnya pemerintah daerah bisa mengupayakan hal tersebut agar jalan masuk ke obyek wisata pantai tanjung belandang diperbaiki dan diperbesar.

Oleh karenanya peran pemerintah dalam pengelolaan perlu dioptimalkan agar daerah wisata di Kabupaten Ketapang dapat dikenal baik dari turis domestik maupun turis mancanegara. Dan Dinas Pariwisata bisa menciptakan Ketapang menjadi kota wisata sesuai dengan visi misinya. Namun saat ini Pantai Tanjung Belandang juga masih belum memiliki fasilitas yang memadai seperti wahana rekreasi air sehingga dalam beberapa infrastruktur masih perlu ditingkatkan. Oleh sebab itulah penulis mengambil judul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Obyek Wisata Pantai Tanjung Belandang Di Kabupaten Ketapang Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah tentang “Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Obyek Wisata Pantai Tanjung Belandang di Kabupaten Ketapang?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apa saja peran Pemerintah daerah dalam Pengembangan Obyek wisata Pantai Tanjung Belandang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat serta pengetahuan dalam menunjang keilmuan hukum. Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan aspek hukum kepariwisataan khususnya di wilayah Kabupaten Ketapang. Agar pariwisata di Kabupaten Ketapang lebih diperhatikan oleh pemerintah setempat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat bagi penulis untuk mengembangkan wawasan serta karya bagi daerah sendiri. Manfaat bagi masyarakat adalah untuk memberikan pengetahuan terkait Pengembangan Obyek Wisata Pantai Tanjung Belandang. Serta manfaat bagi Pemerintah adalah sebagai acuan dalam Pengembangan Obyek Wisata Pantai Tanjung Belandang.

E. Kerangka Penelitian

1. Tinjauan Pustaka

a. Peranan Pemerintah

Pelaksanaan proses pemerintahan dan pembangunan di negara berkembang, pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat strategis. kedudukan yang strategis ini berkaitan dengan fungsinya selaku “pelayan

publik” guna meningkatkan kesejahteraan, keadilan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat.

Pemerintah merupakan manifestasi dari kehendak rakyat, karena itu harus memperhatikan kepentingan rakyat dan melaksanakan fungsi pelayanan publik dan pengaturan warga negara. Untuk melakukan fungsi pemerintahan tersebut, pemerintah melakukan aktivitas pelayanan, pengaturan, pembinaan, koordinasi, pengelolaan, dan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Dalam menjalankan pemerintahan, maka tugas pokok yang harus dijalankan terdapat tiga fungsi yang hakiki yaitu : “pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*).” Berdasarkan hubungan tersebut pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, dan pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.¹

Pemerintah itu hadir untuk mengelola kemudian mendistribusikan berbagai kebutuhan masyarakatnya melalui organisasi pemerintahan, dan organisasi pemerintahan terendah yang berhadapan langsung dengan masyarakat adalah pemerintah desa atau kelurahan. Pemerintah desa atau kelurahan memegang peranan yang penting dalam pengelolaan kebutuhan masyarakat.

Dalam melaksanakan peran dan fungsinya, pemerintah tidak dapat

¹ Rasyid, Muhammad *Ryaas*, 2000, Makna Pemerintahan – Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan, Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya. Hlm.48

lepas dari kebijakan publik, aktivitas administratif, organisasi dan manajemen, pelayanan publik, serta kepentingan dan urusan publik. fungsi ini berkaitan erat dengan fungsi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu “menyediakan layanan civil dan jasa publik yang tidak diprivatisasikan bagi setiap orang pada saat yang dibutuhkan (dituntut) oleh orang yang bersangkutan”².

Lebih lanjut dalam hubungan pemberdayaan masyarakat atau partisipasi, mau tidak mau, pemerintah yang merupakan kumpulan orang-orang pandai dan pilihan, memiliki teknologi, kekuasaan dan kemampuan administratif yang memadai, memelopori pembangunan bangsa. fungsi pemerintahan di samping memberi ruangan yang cukup luas bagi kepentingan rakyat, juga bertugas memenuhinya melalui kegiatan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan peran dan fungsinya, organisasi pemerintahan (menurut pendekatan administratif) menggunakan pendekatan tata administrasi yang diawali oleh pematangan struktur kekuasaan, pembagian tugas, spesialisasi, fungsi kegiatan, koordinasi, jenjang pengawasan.

Kehadiran pemerintah dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang urgen bagi proses kehidupan masyarakat, baik dalam suatu kelompok maupun sebagai individu. Kehadiran pemerintah yang lebih awal adalah untuk mengatur dan melindungi masyarakat agar senantiasa dalam keadaan aman

² Ndraha, Taliziduhu, 2000. Ilmu Pemerintahan Jilid I – IV. Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan. Hlm.543

dan tertib dan ketika masyarakat menginginkan suatu bentuk kehidupan diluar aturan-aturan pemerintah, maka saat itulah berbagai bentuk persoalan sosial akan muncul. Masalah-masalah yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat lambat laun akan menyentuh dan disentuh oleh administrasi Negara sebagai suatu masalah yang mendesak untuk dipecahkan oleh pemerintah³.

Berkaitan dengan pembangunan nasional maka pemerintah memiliki beberapa fungsi-fungsi tertentu:

- a. Pemerintah selaku stabilisator, baik dalam menjaga stabilitas politik, stabilitas ekonomi maupun stabilitas sosial budaya.
- b. Pemerintah sebagai inovator baik dalam bidang administrasi negara/pemerintah; inovasi konsepsionil dalam ide-ide mengenai pembangunan; serta inovasi dalam sistem, prosedur serta tenaga kerja
- c. Pemerintah sebagai pelopor dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.
- d. Dengan adanya kepeloporan dalam satu bidang maka akan mempunyai pengaruh yang positif terhadap bidang-bidang lain.⁴

Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial. Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi.

Menurut soerjono soekanto dalam buku sosiologi suatu pengantar mengatakan bahwa peranan merupakan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya

³ Thoha, Miftah. 2005. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, edisi 8. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm.53

⁴ Siagian, P. Sondang. 2003. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya* Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hlm.105-110

sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

Peranan mencakup 3 hal, yaitu:

- a. peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat
- b. peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- c. peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁵

b. Pengertian Pariwisata

Istilah pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu “pari” dan “wisata”. Pari berarti berulang-ulang atau berkali-kali, sedangkan wisata berarti perjalanan atau bepergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berulang-ulang atau berkali - kali. Orang yang melakukan perjalanan disebut traveller (bahasa Inggris), sedangkan orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan wisata disebut tourist.⁶

MachIntosh mengatakan, “Pariwisata adalah sejumlah gejala dan hubungan yang timbul, mulai dari interaksi antara wisatawan di satu pihak, perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan dan pemerintah serta masyarakat yang bertindak sebagai tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan dimaksud”.⁷

Berdasarkan pengertian Pariwisata diatas dapat disimpulkan bahwa

⁵ Soerjono Soekanto, sosiologi suatu pengantar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2013) Hlm.217

⁶ Drs. MUSANEF, MBA, 1996, Manajemen Usaha Pariwisata Di Indonesia, PT Toko Gunung Agung, Cetakan Kedua, Hlm 8.

⁷ Drs. H. Oka A. Yoeti, M.B.A. 2016, Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata, PT Balai Pustaka (Persero)

pariwisata sangat berkaitan dan sangat berpengaruh dengan perkembangan masyarakat sekitar pantai dan obyek wisata pantai tanjung belandang. Hal ini juga menjadi tujuan dari kepariwisataan yang tercantum di dalam Pasal 4 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatan dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa tujuan dari Kepariwisatan yang utama adalah peningkatan dari sektor perekonomian. Dalam konteks pariwisata, sumber daya diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna mendukung pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁸

Menurut Robinson dalam Piata, pariwisata berkembang karena adanya wilayah yang baru, mencari perubahan suasana, atau untuk mendapat perjalanan baru.⁹

Pembangunan disektor kepariwisataan perlu ditingkatkan dengan cara mengembangkan dan mendayagunakan sumber-sumber serta potensi kepariwisataan nasional maupun daerah agar dapat menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan dalam rangka memperbesar penerimaan devisa atau pendapatan asli daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja terutama bagi masyarakat setempat.¹⁰

Wisata berdasarkan jenisnya dapat dibagi ke dalam lima kategori, yaitu :

⁸ I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, Pengantar Ilmu Pariwisata, (Yogyakarta: Andi, 2009), Hlm.68.

⁹ I Gede Pitana, Sosiologi Pariwisata, (Yogyakarta: ANDI, 2005), Hlm.40.

¹⁰ H. Achmad Dimiyanti, Usaha Pariwisata, Jakarta, 2003, Hlm, 87

- 1.) Wisata Pantai (Marine Tourism), merupakan kegiatan pariwisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olahraga air lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum.
- 2.) Wisata Etnik (Etnic Tourism), merupakan perjalanan untuk mengamati perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang dianggap menarik.
- 3.) Wisata Cagar Alam (Ecotourismi), merupakan wisata yang banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa udara dipegunungan, keajaiban hidup binatang (margasatwa) yang langka, serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat ditempat-tempat lain.
- 4.) Wisata Buru, merupakan wisata yang dilakukan di negeri-negeri yang memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang di benarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan.
- 5.) Wisata Agro, merupakan jenis wisata yang mengorganisasikan perjalanan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, dan ladang pembibitan dimana wisata rombongan dapat mengadakan kunjungan dan tinjauan untuk tujuan studi maupun menikmati segarnya tanaman sekitarnya.¹¹

c. Obyek wisata

Obyek wisata adalah suatu tempat atau ciri alam yang memiliki sumber daya pariwisata dan dibangun, dikembangkan, dan dipelihara agar menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan.¹²

Obyek wisata dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis menurut tujuannya: wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Wisata buatan adalah kegiatan rekreasi dan wisata yang menggunakan objek wisata yang banyak dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Wisata buatan adalah destinasi atau daya tarik wisata yang biasanya dibuat oleh manusia untuk tujuan

¹¹ M. Liga Suryadana dan Vanny Octavis, Pengantar Pemasaran Pariwisata, (Bandung: Alfabeta, 2015), Hlm.32-33.

¹² SK MENPARPOSTEL No.: KM. 98/PW.102/MPPT-87

rekreasi. Atraksi buatan memang sengaja dibuat untuk menarik wisatawan.¹³

Di dalam pariwisata Ada tiga aspek penting yang harus diutamakan dalam pembangunan dan pengembangan suatu destinasi wisata, yaitu konsep 3A:

a) *Atraksi*

Atraksi dalam pariwisata merupakan daya tarik utama dari sebuah destinasi wisata. Atraksi wisata meliputi segala sesuatu yang dapat dinikmati oleh wisatawan, seperti dapat dilihat, didengar, dirasakan atau dilakukan, baik berupa daya tarik alam, budaya maupun hasil kreativitas masyarakatnya. Daya tarik alam bisa berupa pemandangan alam, air terjun, sungai, keberadaan flora dan fauna atau yang lainnya. Atraksi wisata harus mampu memberikan kesan pengalaman kepada setiap wisatawan, sehingga tujuannya melakukan kegiatan pariwisata bisa tercapai.

b) *Aksesibilitas*

Aksesibilitas yang baik merupakan aspek yang penting bagi tumbuh dan berkembangnya sebuah pariwisata. Akses yang bersifat fisik maupun non fisik untuk menuju destinasi merupakan hal penting dalam pengembangan pariwisata. Aktivitas kepariwisataan banyak tergantung pada transportasi dan komunikasi karena faktor jarak dan waktu yang mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Selain transportasi yang berkaitan dengan aksesibilitas adalah prasarana meliputi jalan, jembatan,

¹³. “Wisata Buatan Harus Mempertimbangkan Dampak Lingkungan”, Jatimpos, 18 Februari 2020 (Diakses pada 1 Juli 2022, pukul 17.03 WIB, di laman <https://www.jatimpos.co/pariwisata/1527-wisata-buatan-harus-pertimbangkan-dampak-lingkungan>)

terminal, stasiun dan bandara. Prasarana berfungsi untuk menghubungkan tempat satu ke tempat yang lain.

c) *Amenitas*

Amenitas Pariwisata adalah segala fasilitas penunjang yang memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk memenuhi kebutuhan selama berwisata. Fasilitas dalam lingkup wisata adalah sumber daya buatan manusia yang diperuntukkan untuk menunjang kegiatan wisatawan yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan aktivitas. Fungsi fasilitas haruslah bersifat melayani dan mempermudah kegiatan dan aktivitas wisatawan. Fasilitas wisata merupakan hal-hal penunjang terciptanya kenyamanan wisatawan untuk mengunjungi daerah tujuan wisata. Adapun sarana-sarana penting yang berkaitan dengan perkembangan pariwisata adalah akomodasi hotel, restoran/tempat makan, air bersih, komunikasi, hiburan, dan keamanan.

Unsur 3A dalam pariwisata ini menjadi penting dimiliki oleh setiap destinasi wisata, karena akan berpengaruh pada tingkat kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan (*length of stay*) dan minat wisatawan untuk berkunjung kembali. Sebagai sebuah kegiatan perpindahan sementara individu atau kelompok ke daerah tujuan di luar tempat tinggal normal, pariwisata harus mampu memberikan kesan pada setiap aktivitas yang dilakukan, kenyamanan dan kelengkapan dari fasilitas pendukung, serta kemudahan akses untuk berkunjung. peran pemerintah daerah sangat

dibutuhkan, untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dalam meningkatkan daya saing pariwisata.

Obyek Wisata Pantai Tanjung Belandang menjadi primadona di Kabupaten Ketapang. Banyak wisatawan yang berkunjung untuk menikmati sunset disore hari dan menikmati indahnya pantai tersebut. Hal ini dapat menjadi peluang dalam mengembangkan industri wisata khususnya di kawasan obyek wisata Pantai Tanjung Belandang. Karena semakin banyak jumlah wisatawan yang berkunjung ketempat wisata maka pendapatan yang akan diperoleh semakin meningkat sehingga dapat terus dilakukan pembangunan terutama dari segi pembangunan fasilitas. Selain itu pembangunan juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing pariwisata dengan negara tetangga sehingga Indonesia menjadi negara yang mampu bersaing dengan negara lain.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini merupakan pedoman operasional yang akan memudahkan dalam proses penelitian mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan obyek wisata pantai tanjung belandang Ketapang berdasarkan Undang Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Pembangunan kepariwisataan pada

hakekatnya adalah mengembangkan dan memanfaatkan obyek wisata dan daya Tarik wisata yang merupakan potensi daerah yang dimiliki. Salah satu fasilitas penunjang paling utama adalah akses masuk menuju Kawasan wisata tersebut.

Kemudian peran pemerintah dalam menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan, selain itu menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha dan juga banyak memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai kepariwisataan selain itu memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya Tarik wisata dan potensi-potensi pariwisata. Potensi-potensi tersebut apabila dikembangkan akan dapat menarik wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menaikkan pendapatan asli daerah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami obyek menjadi sasaran sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁴ Berdasarkan

¹⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm. 2.

masalah yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Bambang Sunggono menyatakan aspek penelitian hukum empiris juga disebut sebagai *non-doctrinal research* atau *socio-legal research*.¹⁵

Penelitian hukum empiris berpijak dari adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis maka penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung atau observasi di lapangan. Penelitian ini dilakukan langsung di Obyek Wisata Pantai Tanjung Belandang di Kabupaten Ketapang dengan observasi dan wawancara, sehingga dapat diketahui mengenai peranan pemerintah daerah dalam mengembangkan obyek wisata Pantai Tanjung Belandang apakah sudah sesuai atau belum dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta; CV.Rajawali Pers, 1999) Hlm. 43.

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitik yaitu adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁶ Penelitian yang dilakukan dengan melihat data dan fakta dilapangan kemudian membandingkan dengan regulasi atau peraturan undang undang yang berlaku. Seperti halnya dengan membandingkan peran pemerintah daerah di Obyek Wisata Pantai Tanjung Belandang Kabupaten Ketapang dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber dilapangan yaitu dinas pariwisata, kepala desa, pedagang, masyarakat sekitar, dan para wisatawan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan dalam bentuk bahan-bahan hukum :

¹⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm. 2.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki sifat mengikat yaitu terdiri dari:
 - a. Undang Undang Dasar 1945
 - b. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer terdiri dari literatur buku, majalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dari penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melalui beberapa tahap yang pada dasarnya dapat dibedakan antara data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi nonpartisan di mana peneliti hanya bertindak sebagai pengobservasi tanpa ikut terjun melakukan aktivitas seperti yang dilakukan kelompok yang diteliti, baik kehadirannya diketahui atau tidak.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan interview secara langsung. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

c. Dokumentasi.

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data melalui arsip-arsip tertulis terutama yang menggunakan teori, hukum, dalil ataupun berbagai data substantif yang berasal dari berbagai sumber baik yang berasal dari Dinas atau Departemen tertentu, dapat pula berupa data yang tersedia pada biro statistic ataupun dokumen lembaga pemerintahan atau swasta, foto serta berbagai sumber yang lain.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama atau berkaitan. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Ketapang (Analisis Pariwisata), Kepala Desa Sungai Awan kiri Kabupaten Ketapang, Pedagang dari 10 orang diambil 3 orang, Masyarakat sekitar dari 10 orang yang diambil 3 orang, Wisatawan dari 15 orang diambil 3 orang.

b. Sampel

Penentuan sampel merupakan proses dalam memilih suatu bagian yang

representatif dari seluruh populasi. Sampel adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok atau keseluruhan yang lebih besar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan tujuan tertentu. Sampel ini ditentukan sendiri oleh peneliti yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat tertentu yang merupakan ciri utama dari populasi. Maka dapat dirumuskan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Dinas Pariwisata Kabupaten Ketapang (analisis pariwisata)
- b. Kepala Desa Sungai Awan Kiri Kabupaten Ketapang
- c. Pedagang 3 orang
- d. Masyarakat sekitar 3 orang
- e. Wisatawan 3 orang

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang dianalisis adalah data yang bersifat kualitatif, yaitu pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara (*interview*), dan pengamatan langsung (*observasi*) dan dengan menggambarkan dan menganalisis data keadaan atau fakta yang sebenarnya di lapangan pada saat penelitian dilakukan.